



PENGELOLAAN ASET DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): TANTANGAN DAN PELUANG

Ulvia Fadilah¹

¹Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang
Email: talithaanggun6@gmail.com¹

Abstrak

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan daerah. Dengan menggali potensi aset yang ada, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset, PAD

Abstrac

Regional asset management is one of the keys to success in increasing regional own-source revenue (PAD). Well-managed regional assets can be a sustainable source of income for local governments and support regional development. By exploring the potential of existing assets, local governments can increase revenue, improve public services, and encourage economic growth. The research method used is descriptive qualitative method. A qualitative descriptive approach is one of the research methods that aims to provide an in-depth and comprehensive description of a phenomenon or event.

Keyword: Asset Management, Local Revenue

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (Basri, 2021)

Untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik fisik maupun pembangunan non-fisik. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan negara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (Setiabudhi, 2019)

Salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah adalah manajemen aset. Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah

dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan dalam hal pengelolaan aset daerah. (Rendy Armando Kakasih, 2018)

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengelolaan aset secara optimal. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik. (Purwanto et al., 2024)

Namun demikian, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Bertambahnya urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah menimbulkan pengaruh bertambahnya volume urusan terutama berkenaan dengan pengurusan atau pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi pemerintah daerah. Dimensi reformasi pemerintahan daerah tersebut tidak saja sekadar perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah, akan tetapi mencakup berbagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga daerah tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, salah satunya penataan mengenai pengelolaan aset daerah.

Maka berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah supaya tidak ada persoalan dikemudian hari bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Penataan tersebut berusaha untuk mengefisiensi dalam hal pengelolaan aset yang ada di daerah. Tujuannya adalah agar pelaksanaannya dan penggunaannya lebih terarah, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dalam pengelolaan barang milik negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pengelolaan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa. Metode ini sangat berguna untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. (Adolph, 2016)

Penelitian kualitatif dianggap lebih sesuai untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai sikap serta pengalaman aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah dalam memahami informasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini, melalui pendekatan kualitatif diharapkan informasi yang lebih luas dan detail tentang tata pengelolaan aset yang akuntebel.

PEMBAHASAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Untuk mencapai manfaat optimal dari sebuah aset, diperlukan pengelolaan yang baik atas siklus hidup aset tersebut. Pengelolaan ini seringkali disebut dengan *life cycle asset management*. Pengelolaan siklus hidup aset ini dapat

dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Aset daerah ialah semua kekayaan pemerintah daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. (Chen et al., 2018)

Mengingat pentingnya manajemen aset bagi pemerintah serta besarnya pengeluaran negara terkait dengan manajemen aset tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik negara secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan dalam Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah merupakan hal yang krusial bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Namun, dalam prakteknya, pengelolaan aset daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering ditemui:

1) Kurangnya Inventarisasi dan Data yang Akurat

Hal ini disebabkan karena adanya pencatatan aset yang tidak konsisten sehingga data aset seringkali tercatat dalam berbagai sistem yang tidak terintegrasi, kurangnya pemeliharaan data, dan hilangnya dokumen penting.

2) Kelemahan Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan aset yang belum terintegrasi dan kurang efektif juga menjadi tantangan besar. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melacak keberadaan dan kondisi aset, sulit mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan dan pemanfaatan aset, dan sulit untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan aset.

3) Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Aset

Banyak pihak, termasuk pejabat pemerintah dan masyarakat, belum menyadari pentingnya aset daerah sebagai sumber pendapatan dan aset produktif. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan aset.

4) Peraturan Perundang-undangan yang Kompleks

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan aset daerah seringkali tumpang tindih dan kompleks. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapannya

5) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah.

6) Perubahan Lingkungan

Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi nilai dan pemanfaatan aset daerah.

7) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dapat memicu terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

8) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset daerah, sehingga mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap aset tersebut.

Jika tidak diatasi dengan baik, tantangan-tantangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan pendapatan daerah, penurunan kualitas pelayanan public, kerugian keuangan negara, dan bahkan bisa terjadi konflik sosial.

Peluang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu menggali berbagai potensi yang ada, termasuk melalui pengelolaan aset daerah yang efektif. (Faqih et al., 2024)

1. Potensi Peningkatan PAD melalui Pengelolaan Aset Daerah

1) Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Dengan cara menyewakan aset-aset yang tidak digunakan secara optimal, seperti gedung pemerintah, tanah kosong, atau fasilitas olahraga; membangun kerjasama dengan swasta untuk mengelola aset daerah secara lebih efisien dan produktif; memperkuat peran BUMD dalam mengelola aset daerah dan menghasilkan keuntungan.

2) Pengembangan Aset Baru

Membangun kawasan industri baru untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja; mengembangkan potensi wisata daerah untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata; mengembangkan kawasan permukiman baru untuk meningkatkan pendapatan dari sektor properti.

3) Peningkatan Nilai Aset

Melakukan revaluasi aset secara berkala untuk mengetahui nilai aset yang sebenarnya dan melakukan pengembangan aset yang ada untuk meningkatkan nilai ekonomisnya.

4) Pemanfaatan Teknologi:

Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan dan mengelola aset daerah secara lebih efektif; memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pengelolaan aset; memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk UMKM dan meningkatkan pendapatan daerah.

2. Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Inventarisasi aset yang komprehensif dengan melakukan pendataan aset secara lengkap dan akurat.

2) Menyusun rencana penggunaan aset yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah jangka panjang.

3) Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan aset.

4) Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset.

5) Membangun lembaga pengelola aset yang profesional dan mandiri.

6) Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.

KESIMPULAN

Pengelolaan aset daerah yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah. Dengan menggali potensi aset yang ada, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.

- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Chen, X. X. X. X., Tsai, M. Y., Wolynes, P. G., da Rosa, G., Grille, L., Calzada, V., Ahmad, K., Arcon, J. P., Battistini, F., Bayarri, G., Bishop, T., Carloni, P., Cheatham, T. E., Collepardo-Guevara, R., Czub, J., Espinosa, J. R., Galindo-Murillo, R., Harris, S. A., Hospital, A., ... Crothers, D. M. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>
- Faqih, A. H., Priyagus, P., & Lestari, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(1), 181–192. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i1.15048>
- Purwanto, R. W., Wahyuningsih, C. D., & Selly, R. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(1), 137–151. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1516>
- Rendy Armando Kakasih, G. M. V. K. S. Y. . T. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan DanaAlokasi Umum Terhadap Belanja Modal PadaKabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi UtaraPeriode 20019-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 124–134.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>